

## PENDAHULUAN

Kebutuhan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi para pengambilan keputusan (seperti manajemen, kreditor, investor dan pemerintah), menciptakan permintaan terhadap jasa audit yang disediakan oleh akuntan publik. Selain itu dengan mengelola risiko bisnis perusahaan dapat memperkecil kerugian yang akan diderita. Melalui pengelolaan risiko bisnis maka perusahaan dapat mengurangi memperkecil kerugian. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh keuntungan atau laba.

Secara umum perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu memberikan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba disebabkan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang benar. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang benar akan berdampak adanya pengurangan praktek kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Untuk mengurangi masalah kecurangan, perusahaan menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal dapat berjalan apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan pengendalian internal untuk mengefektifkan aktivitas perusahaan.

Sistem pengendalian internal merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk

mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan

Membangun kepercayaan diri sendiri dan penanaman kompetensi, serta tanggung jawab atas pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik, merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi pengendalian internal. Dengan implementasi pengendalian internal yang memadai diharapkan pengelolaan yang efisien serta efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih terjamin.

Pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan akan memiliki nilai-nilai integritas, kejujuran dan keseimbangan. Melalui ketiga nilai tersebut tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* selanjutnya disingkat GCG. GCG mengandung makna bahwa pengelola perusahaan wajib dan harus melaksanakan akuntabilitas serta transparansi dengan baik. Dengan demikian kepentingan para pemegang saham ataupun *stakeholders* dapat terpenuhi secara baik. Perusahaan menjadikan GCG sebagai cermin dari nilai-nilai kehidupan korporasi yang efektif, dengan tujuan utama untuk menerangi dan mencerahkan visi perusahaan kepada setiap pribadi korporasi, buat meningkatkan kekuatan dan kesehatan perusahaan.

GCG harus dapat menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap promosi jabatan, kenaikan gaji, dan pemberian penghargaan kepada karyawan; termasuk harus bisa menjadi energi yang mendorong setiap orang di perusahaan untuk meningkatkan kualitas diri pribadi,

pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan; serta mampu menjadikan setiap pribadi sebagai energi sukses yang siap mendedikasikan semua potensi dan bakat buat keberhasilan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok bahasan tugas akhir ini adalah “Peranan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan pengendalian internal dalam menekan kecurangan. Tujuan dari makalah tugas akhir ini adalah untuk mengetahui peranan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan pengendalian internal dalam menekan kecurangan.

## PEMBAHASAN

### *Good Corporate Governance*

#### **a. Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan, sehingga dapat mengurangi *conflict of agents*.

Menurut Komite Cadbury dalam Surya, dkk., (2006:24-25) adalah,

“*Corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder*. Hal ini

berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya”.

Menurut Melvill dalam Sunarto (2003) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan sebuah sistem guna mengontrol dan mengarahkan perusahaan. Para manajer perusahaan berperan secara efektif terhadap *corporate governance* dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain: (a) mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola risiko dan peluang; (b) menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap; (c) mentaati standar-standar etika; dan (d) memandang dewan direksi perusahaan sebagai ‘ahli’ dan kewenangan legalnya diakui. Sementara akuntan manajemen dapat berperan dalam hal-hal antara lain: (a) memberikan informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan; (b) merancang dan menerapkan sistem *internal control* yang berperan sebagai dewan penjamin; (c) menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati; dan (d) mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat dari aktivitas utama.

## **b. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance***

Tujuan dari penerapan *corporate governance* menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* mulai

muncul dan berkembang baru-baru ini, yaitu menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) maupun *Komite Kebijakan Corporate Governance* (Lestariningsih, 2008).

Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Hak-hak pemegang saham. Dalam hal ini pemegang saham harus diberi informasi yang benar dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. Pemegang saham dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan orang dalam.
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kepentingan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

5. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

### **c. Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

*Corporate governance* merupakan sebuah sistem guna mengontrol dan mengarahkan perusahaan. Para manajer perusahaan berperan secara efektif terhadap *corporate governance* guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Kaihatu (2006), prinsip-prinsip *Corporate Governance* meliputi:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perusahaan yang berlaku.

#### **d. Manfaat *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, dengan menerapkan *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, yaitu:

1. Meminimalkan *Agency Cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Biaya-biaya inilah yang disebut *agency cost*. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya ini bisa ditekan serendah mungkin.

2. Meminimalkan *Cost of Capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus

ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. Hal tersebut, selain dapat memperkuat kinerja keuangan, juga akan membuat produk perusahaan yang dilepas ke pasaran menjadi lebih kompetitif.

### 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu faktor utama yang dinilai investor sebelum memutuskan untuk membeli saham adalah kualitas dewan komisaris. Hal ini dapat terlihat pada investor yang melakukan investasi dalam jangka waktu yang lama.

### 4. Mengangkat citra perusahaan

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

## **Pengendalian Internal**

### **a. pengertian pengendalian Internal**

Menurut Jusuf (2001:249), sebuah publikasi dari AICPA pada tahun 1947 berjudul *Internal Control*, menyebutkan faktor-faktor berikut sebagai pendorong atas semakin luasnya pengakuan tentang pentingnya pengendalian intern:

1. Lingkup dan besarnya perusahaan sudah menjadi sedemikian kompleks dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara langsung. Untuk mengatasi hal itu,

manajemen harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif.

2. Pengecekan dan *review* yang melekat pada suatu sistem pengendalian intern yang baik, akan dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
3. Ditinjau dari segi auditing, sistem pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien akan sangat bermanfaat dalam membatasi lingkup audit. Dengan adanya keterbatasan waktu dan besarnya honorarium audit, pada umumnya tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan audit, tanpa mengandalkan pada sistem pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien.

Laporan COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipegaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Efektifitas dan efisiensi operasi.

#### **b. Komponen Pengendalian Internal**

Menurut Jusuf (2001:257-258), komponen struktur pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

2. Perhitungan risiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas pengendalian
5. Pemonitoran

Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. Ia merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, dengan menciptakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian dalam sebuah perusahaan terdiri dari berbagai faktor diantaranya adalah:

1. Integritas dan nilai-nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Dewan komisaris dan komite audit.
4. Falsafah manajemen dan gaya operasi.
5. Struktur organisasi.
6. Penetapan kewenangan dan tanggungjawab.
7. Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia.

Menurut Jusuf (2001:264-267), pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan transaksi-transaksi tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan komputer maupun dikerjakan secara manual dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pengotorisasian yang tepat

Tujuan utama prosedur pengotorisasian yang tepat adalah untuk menjamin bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi oleh personel manajemen yang berwenang. Otorisasi dapat berupa

otorisasi umum atau otorisasi khusus. Otorisasi umum berhubungan dengan kondisi umum yang menaungi transaksi yang diotorisasi, seperti daftar harga standar produk.

b. Dokumen dan catatan

Dokumen merupakan bukti terjadinya transaksi berikut harga, sifat dan syarat-syarat transaksi. Contoh dokumen-dokumen yang banyak dijumpai adalah faktur, cek, dan kontrak-kontrak. Apabila dokumen harus ditandatangani atau dicap, maka dokumen juga dapat merupakan dasar untuk menetapkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

c. Pengecekan independen

Pengecekan independen menyangkut verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh orang lain atau bagian lain atau kebenaran penilaian dari jumlah yang dicatat. Contoh pengecekan independen dan asersi yang berhubungan dengan pengecekan tersebut adalah:

- 1) Pegawai bagian pengiriman melakukan verifikasi mengenai kecocokan antara barang yang diterima dari gudang dengan tembusan order penjualan yang telah diotorisasi sebelum mengirimkan barang (asersi keberadaan atau keterjadian, dan asersi kelengkapan).
- 2) Pengawas di bagian penjualan mencocokkan harga yang tercantum dalam faktur yang dibuat oleh petugas pembuat faktur dengan daftar harga yang telah diotorisasi manajemen,

sebelum mengirimkan faktur tersebut kepada pembeli (asersi penilaian dan pengalokasian).

### **Pengertian Kecurangan (*Fraud*)**

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut.

Menurut *Bologna, Lindquist* dan *Wells* dalam Amrizal (2004) mendefinisikan “kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara *financial*.”

Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu

- (1) Tindakan/*the act*.
- (2) Penyembunyian/*the concealment*
- (3) konversi/*the conversion*

Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut misalnya dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai

sendiri atau menjual persediaan tersebut. Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal.

Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja.

Menurut Loebbecke *et al.* (1989) dalam Amrizal (2004), kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian (*concealment*). Penyembunyian itu terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Jika auditor meminta bukti transaksi yang mengandung kecurangan, dia akan menipu dengan memberi informasi palsu atau tidak lengkap.

Johnson *et al.* (1991) dalam Amrizal (2004) menyebutkan ada tiga taktik yang digunakan manajer untuk mengelabui auditor. Taktik pertama adalah membuat deskripsi yang menyesatkan (seperti mengatakan perusahaan yang sedang menurun sebagai perusahaan yang bertumbuh) agar menyebabkan auditor menghasilkan ekspektasi yang tidak benar sehingga gagal mengenali ketidakkonsistenan. Taktik kedua adalah menciptakan bingkai (*frame*) sehingga menimbulkan hipotesis tidak adanya

ketidakberesan (*nonirregularities hypothesis*) untuk evaluasi ketidakkonsisten yang terdeteksi.

### **Peranan GCG untuk Meningkatkan Pengendalian Internal**

Dengan menerapkan GCG secara benar, maka manajemen perusahaan dapat secara proporsional menerapkan target-target yang realistis. GCG menjadi pilihan perusahaan yang mememanajementi perusahaan secara benar. Nilai perusahaan akan menjadi meningkat karena penerapan GCG.

Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan kepada pengelolaan perusahaan tempat berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* akan meningkatkan aktifitas pengendalian internal sehingga dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi sebagai pengelola perusahaan. Hal ini akan menekan kemungkinan terjadinya kerugian bagi perusahaan maupun pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa.

Melalui *good corporate governance*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik, sehingga akan dapat menghasilkan keputusan yang optimal, serta mampu meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini

jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif.

Selain GCG, adanya keberadaan auditor internal pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola perusahaan. Mengingat pentingnya keberadaan auditor internal dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian, maka auditor internal perlu mendapatkan perhatian dari manajemen.

Auditor internal adalah fungsi penilaian yang independent dalam suatu organisasi yang diperlukan untuk memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk pengendalian internal. Tujuan audit bagi suatu perusahaan tidak hanya sekedar untuk mengamati dan mengecek kegiatan secara fisik saja, tetapi juga untuk melaksanakan suatu fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan secara periodik terhadap catatan-catatan dan untuk menetapkan kebenaran catatan tersebut, mengevaluasi pengendalian internal dan mengecek adanya ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur/mekanisme pengendalian intern. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak manajemen suatu organisasi.

Dalam rangka pencegahan *fraud*, maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku *fraud* tidak berani melakukan *fraud*. Apabila *fraud* terjadi, maka dampak yang timbul diharapkan dapat diminimalisir. Auditor internal bertanggungjawab untuk membantu pencegahan *fraud* dengan jalan melakukan pengujian (*test*) atas kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (*potential risk*) telah diidentifikasi.

Dalam pelaksanaan audit kinerja (*performance audit*), audit keuangan (*financial audit*) maupun audit operasional (*operational audit*), auditor internal harus mengidentifikasi adanya gejala kecurangan (*fraud symptom*) berupa *red flag* atau *fraud indicator*. Hal ini menjadi penting, agar apabila terjadi *fraud*, maka auditor internal lebih mudah melakukan investigasi atas *fraud* tersebut.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO: 1992) dalam Amrizal (2004).

## **Hubungan Pengendalian Internal dengan Meminimalisasi Resiko Kecurangan**

Pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika suatu sistem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengamankan harta perusahaan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum peraturan yang berlaku.

Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik.

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko.

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

- (1) Review Kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

- (2) Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi

adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

(3) Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

(4) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal

### 3. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

#### (1) Keadilan (*Fairness*)

Melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### (2) Transparansi

Keterbukaan (*disclosure*) bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham /publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.

#### (3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus

perusahaan atas keputusan – keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

(4) Tanggung jawab (*Responsibility*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada.

(5) Moralitas

Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.

(6) Kehandalan (*Reliability*)

Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan

(7) Komitmen

Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Peranan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan pengendalian internal melalui manajemen perusahaan dengan menerapkan target-target yang realistis, maka diharuskan pengendalian internal yang baik secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dikatakan baik apabila pengendalian internal dapat meminimalkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan maupun manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, 2004, Pencegahan dan Pendeksian Kecurangan oleh Internal Auditor, *Diklat*, Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Arens, A.A., dan Loebbecke, J.K., 2003, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Buku Satu, Jakarta: Salemba Empat.
- Jusuf., A.H.,, 2001, *Auditing: Pengauditan.*, Yogyakarta: YKPN UGM.
- Kaihatu, T.S., 2006, *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 8 No.1 Maret.
- Lamriana, 2009, *Fraud* (kecurangan): Apa dan Mengapa?, *Sie Infokum*, Vol. 8, Maret: 1-12.
- Lestariningsih, 2008, Peranan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengembangan Publik, *Spirit Publik*, Volume 4, No.2.
- Mustafa, B., 2004, Pengendalian Intern dan pemberantasan Korupsi, Artikel Warta Pengawasan, Vol. XI, No.1
- Sawyer, L.B., Dittenhofer, M.A., dan Scheiner, J.H., 2006, *Audit Internal Sawyer*, Buku 3, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto, 2006, *Good Corporate Governance*, Mampukah Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Akuntabilitas*, Vol.6, No.1.
- Sunarto, 2003, *Corporate Governance* dan Kinerja Saham, *Fokus Ekonomi* Desember, Stikubank Semarang.

Surya, I., dan Yustiavandana, I., 2006, *Penerapan Good Corporate Governance L Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana.